

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penanggulangan pemanasan global menjadi permasalahan yang sedang diperjuangkan oleh dunia internasional. Salah satu penyebab pemanasan global adalah emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Indonesia menjadi salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Emisi gas rumah kaca Indonesia telah mencapai 1.764,6 juta ton setara karbondioksida (CO₂e). Sektor industri sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang digerakkan dengan bahan bakar fosil menyumbang sekitar 19% dari total emisi Indonesia (www.thequality.co.id).

Implikasi lingkungan dari aktivitas industri menyebabkan munculnya regulasi mengenai lingkungan, seperti pedoman pengungkapan lingkungan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI). Sebagai sebuah pedoman, GRI menggunakan prinsip materialitas, dimana perusahaan tidak harus melaporkan seluruh aspek yang ada dalam pedoman, melainkan hanya melaporkan hal-hal yang pengaruhnya cukup signifikan dan material bagi para pemangku kepentingan (GRI, 2016). Kerangka hukum internasional mengenai pemanasan global ditandai dengan adanya *UN Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) pada tahun 1992, yang lebih dikenal dengan Deklarasi Rio. Kemudian dilanjutkan *Conference of Parties to UNFCCC* yang kemudian menghasilkan Protokol Kyoto. Konvensi ini berisi bahwa industri turut memicu masalah pemanasan global, maka penting bagi industri untuk melakukan pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan

pengungkapan emisi karbon. Pada Protokol Kyoto, ada 6 jenis Gas Rumah Kaca (GRK) yang ditargetkan penurunannya yaitu CO₂, CH₄, N₂O, SF₆, PFC, dan HFC. Penelitian ini berfokus pada emisi karbon, hal ini dikarenakan jumlah keseluruhan emisi karbon tertinggi diantara GRK lainnya.

Sampai saat ini, praktik pengungkapan emisi karbon di Indonesia masih merupakan *voluntary disclosure*, sehingga tidak semua perusahaan mengungkapkan informasi mengenai emisi karbon. Salah satu alasan perusahaan mengungkapkan informasi mengenai emisi karbon adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam rangka memenuhi kepentingan *stakeholder*.

Keputusan untuk mengungkapkan informasi, termasuk informasi mengenai emisi karbon, dilakukan oleh mekanisme *Corporate Governance* khususnya yang terkait dengan kepengurusan perusahaan, yaitu dewan direksi dan dewan komisaris. Dewan direksi memiliki tanggung jawab atas pengelolaan perusahaan. Sedangkan komisaris bertugas melakukan pengawasan. Dalam rangka menjaga independensi dan memastikan perusahaan tidak merugikan pihak lain maka diperlukan dewan komisaris independen. Dalam menjalankan tugas, dewan komisaris dibantu oleh beberapa komite, salah satunya komite audit. Selain bertanggung jawab mengawasi pelaporan keuangan, risiko dan kontrol, serta *Corporate Governance*, komite audit juga memantau tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat sekitar industri berdiri, ketaatan perusahaan terhadap aturan sosial, serta memastikan perusahaan menjalankan etika bisnis (KNKG, 2006).

Beberapa perusahaan menahan pengungkapan emisi karbon karena informasi tersebut membutuhkan biaya yang besar. Oleh karena itu, perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik mampu membayar sumber daya manusia atau keuangan yang dibutuhkan untuk pengungkapan emisi karbon (Choi *et al.*, 2013). Dalam penelitian ini, kondisi keuangan digambarkan dengan profitabilitas. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi mengungkapkan informasi untuk memberikan sinyal bahwa mereka dapat bertindak dengan baik atas tekanan lingkungan secara efektif dan bersedia untuk menyelesaikan masalah dengan cepat (Choi *et al.*, 2013)

Penelitian terdahulu yang meneliti mengenai pengaruh *Corporate Governance* terhadap pengungkapan emisi karbon adalah penelitian Kiliç dan Kuzey (2018). Penelitian ini menggunakan variabel independen *board size*, *board independence*, *board gender diversity*, *board nationality diversity*, dan *sustainability committee*. Variabel dependen dari penelitian ini adalah *carbon emission disclosure*. Hasil dari penelitian ini adalah *board size*, *board independence*, *board nationality diversity*, dan *sustainability committee* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *carbon emission disclosure*. Sedangkan untuk variabel *board gender diversity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *carbon emission disclosure*. Penelitian dari Yunus *et al.* (2016) yang meneliti mengenai faktor keputusan untuk mengadopsi strategi manajemen dengan obyek 200 perusahaan Australia. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa kehadiran sistem manajemen lingkungan, komite audit, ukuran dewan, dan independensi dewan berpengaruh positif terhadap adopsi strategi manajemen karbon. Penelitian

Liao *et al.* (2015) yang mengambil sampel 329 perusahaan terbesar di Inggris. Penelitian ini menyatakan bahwa *board gender diversity* secara positif mempengaruhi tingkat pengungkapan Gas Rumah Kaca. Penelitian Choi *et al.* (2013) menyimpulkan bahwa perusahaan yang beroperasi dalam industri intensif, tingkat emisi karbon, ukuran perusahaan, profitabilitas dan kualitas *corporate governance* berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

B. Rumusan Masalah

Perkembangan saat ini, pengungkapan informasi mengenai emisi karbon masih merupakan *voluntary disclosure*. Akibatnya, tidak semua perusahaan mengungkapkan informasi ini. Salah satu alasan perusahaan mengungkapkan informasi mengenai emisi karbon adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam rangka memenuhi kepentingan *stakeholder*.

Keputusan untuk mengungkapkan informasi, termasuk informasi mengenai emisi karbon, dilakukan oleh mekanisme *Corporate Governance* khususnya yang terkait dengan kepengurusah perusahaan, yaitu dewan direksi dan dewan komisaris. Dewan direksi memiliki tanggung jawab atas pengelolaan perusahaan. Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan. Dalam rangka menjaga independensi dan memastikan perusahaan tidak merugikan pihak lain maka diperlukan dewan komisaris independen. Dalam menjalankan tugas, dewan komisaris dibantu oleh beberapa komite, salah satunya komite audit. Selain bertanggung jawab mengawasi pelaporan keuangan, risiko dan kontrol, serta *Corporate Governance*, komite audit juga memantau tanggung jawab perusahaan

kepada masyarakat sekitar industri berdiri, ketaatan perusahaan terhadap aturan sosial, serta memastikan perusahaan menjalankan etika bisnis (KNKG, 2006).

Dalam rangka berkontribusi dalam mengurangi emisi dan melakukan pengungkapan, perusahaan membutuhkan sumber daya yang besar. Oleh karena itu, perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik mampu membayar sumber daya manusia atau keuangan yang dibutuhkan untuk pengungkapan emisi karbon (Choi *et al.*, 2013). Dalam penelitian ini, kondisi keuangan digambarkan dengan profitabilitas. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi mengungkapkan informasi untuk memberikan sinyal bahwa mereka dapat bertindak dengan baik atas tekanan lingkungan secara efektif dan bersedia untuk menyelesaikan masalah dengan cepat (Choi *et al.*, 2013)

Penelitian ini menggunakan acuan penelitian Kiliç dan Kuzey (2018) dan Choi *et al.*, (2013). Kiliç dan Kuzey (2018) menggunakan variabel independen luas dewan direksi, dewan komisaris independen, keberagaman gender pada dewan, keberagaman kebangsaan pada dewan, dan komite lingkungan. Penelitian Choi *et al.*, (2013) dengan variabel independen tipe industri, tingkat emisi karbon, ukuran perusahaan, profitabilitas dan kualitas *corporate governance*. Penelitian ini tidak menggunakan semua variabel dalam penelitian Kiliç dan Kuzey (2018) dan penelitian Choi *et al.*, (2013), tetapi hanya memilih variabel profitabilitas, luas dewan direksi, dewan komisaris independen. Penelitian ini juga menambahkan variabel komite audit. Sehingga variabel penelitian ini adalah profitabilitas, luas dewan direksi, dewan komisaris independen, dan komite audit.

Sampel dari penelitian ini industri sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar BEI. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut:

Apakah dewan direksi, dewan komisaris independen, komite audit, dan profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon pada industri di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh dewan direksi, dewan komisaris independen, komite audit, dan profitabilitas terhadap pengungkapan emisi karbon pada industri di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teori

Penelitian ini memberikan tambahan literatur mengenai pengaruh tata kelola perusahaan dan profitabilitas terhadap pengungkapan emisi karbon.

2. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan memberikan pertimbangan bagi regulator dalam membuat regulasi baru mengenai pengungkapan emisi karbon pada perusahaan

3. Manfaat Praktek

Penelitian ini diharapkan memberikan pertimbangan bagi perusahaan di Indonesia dalam mengungkapkan informasi mengenai emisi karbon.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu BAB I (Pendahuluan), BAB II (Landasan Teori), BAB III (Metode Penelitian), BAB IV (Analisis Data dan Pembahasan), dan BAB V (Penutup).

BAB I Pendahuluan, akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Profitabilitas, dan Pengungkapan Emisi Karbon, berisi teori-teori dari ahli maupun penelitian-penelitian terdahulu yang menunjang penelitian. Selain itu, BAB II juga berisi kerangka konseptual, penelitian-penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian, menjelaskan mengenai objek penelitian, populasi dan sampel, metode pengambilan sampel, jenis dan teknik pengumpulan data, operasionalisasi variabel, metode analisis data, dan uji instrumen penelitian.

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan, menjelaskan analisis penelitian mengenai pengaruh dewan direksi, dewan komisaris independen, komite audit, dan profitabilitas terhadap pengungkapan emisi karbon.

BAB V Penutup, bagian ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian.

